

Judul : Menimbang Subsidi Pupuk ke Petani atau ke Produk
Tanggal : Senin, 22 Februari 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 17

Menimbang Subsidi Pupuk ke Petani atau ke Produk

Subsidi pupuk dengan pola yang diberikan kepada petani dalam bentuk pupuk terbilang tidak efektif.

PUKUP SUBSIDI: Petani menabur pupuk pada tanaman padi di Aceh Besar, Aceh, Selasa (11/8/2020). Pemerintah memberikan bantuan ke petani berupa pupuk subsidi sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan

M IQBAL AL MACHMUDI
iqbal@mediaindonesia.com

PEMBAHASAN mengenai efektivitas penyaluran subsidi ke sektor pertanian akan selalu membawa pada diskusi pola penyalurannya. Apakah subsidi diberikan ke petani langsung melalui mekanisme *cash transfer* atau tetap diberikan kepada input produksi, berupa subsidi pada harga pupuk.

Guru Besar IPB University yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas, merupakan salah satu pihak yang menganggap pemberian subsidi input tidak lagi tepat.

Ia menilai subsidi pupuk dengan pola yang diberikan kepada petani dalam bentuk pupuk terbilang tidak efektif.

Tanda tidak efektif subsidi tersebut dilihat dari produksi yang tidak meningkat padahal subsidi pupuk telah disokong dengan program lainnya, seperti Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai (Uppsud Pajale), tetapi hasilnya tetap tidak efektif.

"Subsidi pupuk terbesar masuk ke padi. Pertumbuhan produksi padi dari 2014-2019 malah minus 0,42% per tahun. Lalu, produksi padi dari 2001-2019 pertumbuhannya hanya 0,78% per tahun," kata Dwi saat dihubungi, Kamis (18/2).

Menurutnya, subsidi pupuk dan barang akan lebih efektif jika dialihkan dalam bentuk yang lain, yakni menjadi subsidi tunai dengan cara transfer sehingga bisa langsung diserap petani. Apalagi subsidi input rawan bocor atau penyelewengan dana sehingga perlu direvisi total.

Dwi Andreas memaparkan keberhasilan pola penyaluran beras bagi rumah tangga miskin (*raskin*) dari subsidi harga beras diganti dengan uang tunai. Efektivitas subsidi input model *raskin* hanya 60% sehingga rawan penyelewengan.

"Pada 2018, kami mengusulkan peralihan *raskin* menjadi *cash transfer*. Dan itu sudah dilakukan, jadi tidak ada lagi *bagai-bagi* beras dan dialihkan menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT). Penerima manfaat mendapatkan uang dan digunakan untuk membeli bahan pokok," ungkapnya.

Dwi bersama timnya juga pernah menghitung bahwa akan terjadi peningkatan pendapatan di petani 31% jika semua subsidi pada sektor pertanian diubah menjadi *cash transfer* dan anggaran negara sudah dipastikan langsung diterima rakyat.

Tantangan bagi penyaluran subsidi langsung ke petani ialah memastikan petani akan menggunakan dana yang diterimanya itu untuk membeli pupuk. Kekawatiran ini wajar mengingat sebagian besar petani di Indonesia ialah petani mikro. Mereka memiliki lahan sawah kurang dari 2 hektare. Umumnya termasuk merupakan rumah tangga miskin sehingga rawan tergoda untuk membelikan dana pencairan subsidi pupuk untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Namun, terhadap kemungkinan itu, Dwi Andreas tidak terlalu khawatir. Ia yakin petani tidak akan mempertaruhkan usahanya ke depan dengan menggunakan dan yang didapatnya untuk membeli kebutuhan selain dari barang-barang pertanian.

"Petani sekarang untuk modal tanam masih utang sana-sini. Petani tidak akan pernah mengor-

bankan hidupnya 3 bulan ke depan hanya uang subsidi dibuat beli rokok atau sepeda motor sebab artinya jika uangnya diinvestasikan ke hal yang lain, selesai sudah 3 bulan ke depan dan gagal produksinya," ujarnya.

Terus memantau

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemerintah selalu mengawal kebijakan yang dikeluarkan, termasuk mengenai pupuk bersubsidi.

"Pupuk subsidi ialah bentuk keseriusan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Dengan kebijakan ini, kita ingin meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk itu, kita selalu memantau dan mengawal kebijakan pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran," kata Syahrul.

Kementerian Perdagangan menetapkan distribusi secara tertutup agar bisa langsung ke sasaran. Hal ini sejalan dengan prinsip 6T dalam penyaluran pupuk bersubsidi, yakni tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, tepat harga, tepat jenis, dan tepat jumlah.

Di sisi lain, anggota Komisi IV

DPR-RI, Charles Meikyansah menyoroti alokasi anggaran pupuk bersubsidi yang terus turun dari tahun ke tahun. Pada 2021 angkanya hanya Rp25,2 triliun untuk 9,0 juta ton dan 1,5 juta liter pupuk cair.

"Alokasi anggaran pupuk bersubsidi tahun ini ialah yang terendah sejak 2015. Padahal, pemenuhan pupuk bersubsidi masih sangat besar sehingga ada jarak antara kebutuhan dan kemampuan," ujar Charles.

Selain anggaran, dirinya juga melihat adanya masalah pada tata kelola, distribusi, dan penerima manfaat dari subsidi pupuk yang harus dibenahi. Namun, ujung dari semua permasalahan tersebut akan kembali ke anggaran yang tak sebanding dengan kebutuhan.

Kembali ke wacana perubahan cara penyaluran subsidi dari input ke petani secara langsung, Kementan sebagai pelaksana program subsidi pupuk siap melakukan penyaluran dalam skema apa pun termasuk mengubah pola subsidi dari produk menjadi tunai asalkan tetap berorientasi pada tujuan, yaitu memfasilitasi penyediaan pangan untuk 270 juta jiwa penduduk Indonesia.

Direktur Pupuk dan Pesticida Kementan, Muhammad Hatta, mengatakan program subsidi pupuk harus diarahkan pada konsep 6 poin, yakni ketepatan sasaran, waktu, mutu, harga, jenis, dan jumlah.

"Dengan demikian, bila skema subsidi langsung yang dipilih harus menjangkau 6 poin tersebut. Untuk itu, beberapa hal yang harus dipertimbangkan," kata Hatta saat dihubungi akhir pekan lalu.

Pertimbangan pertama, yakni harus dipastikan subsidi tunai hanya dapat dipergunakan untuk membeli pupuk sehingga perlu mekanisme pengaturan dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran tersebut oleh tiap-tiap penerima bantuan.

"Selain itu, terdapat penanggung jawab atas pengawasannya serta mekanisme pelaporannya," ucapnya.

Akurasi pendataan petani mutlak diperlukan untuk menyeleksi petani yang berhak dan siapa yang bertanggung jawab atas pendataannya, nomor rekening, usulan kebutuhan pupuk tiap-tiap petani, waktu transfernya, dan lainnya. (E-1)

ANTARA/IRWANSYAH PUTRA